



Peran APIP dan Efektivitas Pengendalian Korupsi dalam Mendorong Capaian SDG 6 di Indonesia

Fitria E. Malelea¹, Sakalindu Kirana Magyanda Uttunggadewi^{2*}, Seto Ferdy Zuzanto³

^{1,2,3}Magister Sains Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

*Corresponding author email: kiranapga24@gmail.com

Abstract

This study investigates whether internal audit capability and the effectiveness of corruption control contribute to the achievement of Sustainable Development Goal (SDG) 6 across 541 local governments in Indonesia. Employing a quantitative design and multiple regression analysis on cross-sectional data from 2021, the research explores how institutional governance factors shape regional performance in the provision of clean water and sanitation services. The empirical findings reveal that stronger corruption control is associated with significantly higher SDG 6 performance, whereas internal government audit capability does not exhibit a statistically meaningful effect. These results suggest that outcomes in basic service delivery are driven more by governance quality, budget integrity, and local social capacity than by formal organizational attributes of internal oversight alone. Consequently, strengthening anti-corruption mechanisms and promoting more accountable and transparent public management are essential to accelerating progress toward SDG 6. The study provides evidence that policy efforts should prioritize governance effectiveness and responsiveness to community needs in order to achieve sustainable improvements in water and sanitation services at the local level.

Keywords: *APIP Capability, Corruption Control, SDG 6.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan efektivitas pengendalian korupsi dalam memengaruhi capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 6 pada 541 pemerintah daerah di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui analisis regresi berganda dan memanfaatkan data cross-sectional tahun 2021, studi ini bertujuan mengidentifikasi faktor institusional yang berkontribusi terhadap kinerja penyediaan air bersih dan sanitasi layak. Hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian korupsi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap capaian SDG 6, sedangkan kapabilitas APIP tidak terbukti berpengaruh secara statistik. Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas tata kelola, integritas dalam pengelolaan sumber daya publik, serta kapasitas sosial daerah memainkan peran yang lebih menentukan dibandingkan karakteristik struktural pengawasan internal semata. Oleh karena itu, penguatan kebijakan antikorupsi yang berkelanjutan serta perancangan program pembangunan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat menjadi agenda penting dalam upaya percepatan pencapaian SDG 6 di tingkat daerah.

Kata Kunci: *Kapabilitas APIP, Pengendalian Korupsi, SDG 6.*

1. PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah agenda global untuk mengakhiri kemiskinan, menekan ketimpangan, melindungi lingkungan, dan memperkuat perdamaian serta keadilan lewat 17 tujuan yang saling terhubung dan ditargetkan tercapai pada 2030 agar setiap orang dapat merasakan manfaat pembangunan tanpa ada yang tertinggal (United Nations, 2023). Memastikan semua orang mendapatkan akses sanitasi yang layak adalah salah satu kungsi untuk mencapai SDGs. Banyak kebijakan pemerintah dan program internasional menempatkan isu ini sebagai prioritas karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup dan pengurangan ketidaksetaraan. Untuk mendukung tujuan tersebut, pemerintah daerah perlu memperkuat tata kelola dan pengawasan. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) berperan memastikan pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah berjalan sesuai aturan, efektif, dan akuntabel melalui kegiatan audit dan pengawasan. Kondisi ini mendorong munculnya penelitian yang melihat bagaimana kapabilitas APIP berperan dalam menekan korupsi dan sejauh mana peran tersebut ikut menentukan pencapaian SDGs di Indonesia. Beberapa penelitian membahas pentingnya struktur internal yang transparan serta efektivitas pengawasan agar target pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik dapat tercapai (HaoYue & Loang, 2023; Martínez-Ferrero & García-Meca, 2020; Phan Thi Thanh Quyen & Marina Ilyinichna Sidorova, 2022).

Ríos et al. (2024) menyatakan bahwa pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan cenderung lebih berhasil menjalankan agenda SDGs. Ketika informasi mudah diakses dan proses pengambilan keputusan diawasi publik, kebijakan yang dibuat lebih tepat sasaran. Kondisi ini mendorong program pembangunan berjalan lebih efektif sehingga capaian SDGs di daerah meningkat. Namun, hingga saat ini penelitian di bidang ini masih terbatas, belum ada kajian yang secara khusus menilai bagaimana mekanisme pengendalian internal pemerintah berkaitan dengan keberhasilan mencegah korupsi yang berdampak pada kualitas hidup, termasuk akses terhadap sanitasi yang layak. Studi ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah peran pengawas internal dalam menekan korupsi. Selanjutnya, peran tersebut diharapkan memberi dorongan pada pencapaian SDGs. SDGs memberikan arah baru bagi pembangunan yang menempatkan keberlanjutan, hak asasi manusia, dan kesetaraan sebagai pondasinya. Tujuan utamanya adalah memperkuat kemajuan sosial, ekonomi, lingkungan, serta menata aspek hukum dan tata kelola. Prinsip “*No One Left Behind*” menegaskan bahwa setiap orang berhak merasakan manfaat pembangunan tanpa terkecuali. Secara keseluruhan, agenda ini memuat 17 tujuan, 169 target, dan 319 indikator yang melanjutkan capaian dari MDGs sebelumnya (Bappenas, 2023). Salah satu tujuan tersebut adalah SDG 6, yang berfokus pada penjaminan ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi yang aman dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. SDG 6 menekankan akses terhadap air minum yang layak, layanan sanitasi yang aman, serta pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Pencapaian tujuan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang.

SDG 6 atau *Clean Water and Sanitation* menekankan pentingnya menjamin ketersediaan air bersih, sanitasi yang layak, dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan untuk semua sebagai bagian dari agenda pembangunan global 2030 PBB (Bappenas, 2025). Akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi yang layak merupakan kebutuhan dasar yang

berdampak langsung pada kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat, karena kurangnya layanan ini berkaitan dengan tingginya beban penyakit berbasis lingkungan serta hambatan ekonomi dan sosial yang luas (misalnya penurunan produktivitas dan meningkatnya biaya kesehatan) yang pada akhirnya menurunkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa air bersih dan sanitasi yang memadai tidak hanya mengurangi penyebaran penyakit, tetapi juga meningkatkan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan sosial, sehingga pencapaian SDG 6 menjadi strategi kunci dalam mempercepat perbaikan kualitas hidup masyarakat di berbagai konteks pembangunan berkelanjutan (Faristya et al., 2025).

Salah satu ukuran pentingnya adalah akses sanitasi yang layak. Gomez et al. (2024) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kemajuan SDGs lebih bermakna jika dinilai melalui indikator kualitas hidup karena cara ini memperlihatkan apakah perbaikan layanan air dan sanitasi benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama kelompok rentan. Selain itu, Mulligan et al. (2020) meneliti tentang kontribusi alam terhadap SDG 6 yang menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya alam berpengaruh langsung pada kualitas layanan air dan sanitasi. Ketika hutan, daerah aliran sungai, dan ekosistem penyangga dilindungi dengan baik, ketersediaan air bersih menjadi lebih stabil, risiko pencemaran turun, dan layanan sanitasi lebih mudah ditingkatkan. Dampak ini kemudian meluas ke tujuan yang lain, seperti kesehatan, ketahanan pangan, dan pengurangan risiko bencana, sehingga kemajuan SDGs dapat dilihat sebagai hasil dari pengelolaan lingkungan yang lebih bijak dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Beberapa studi, baik teoritis maupun empiris menunjukkan bahwa pemerintah daerah mempengaruhi pencapaian terhadap SDGs (Bilsky et al., 2021; Guha & Chakrabarti, 2019; Masuda et al., 2022). Pencapaian SDGs menuntut akuntan profesional mampu memasukkan indikator keberlanjutan ke dalam praktik sehari-hari agar keputusan organisasi berjalan lebih bertanggung jawab (Makarenko & Plastun, 2017). Sahari et al. (2023) menunjukkan bahwa ketika audit internal dan sistem pengendalian internal pemerintah berfungsi dengan baik, pemerintah daerah cenderung menunjukkan kinerja administratif yang lebih tinggi. APIP memiliki peran strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, pengelolaan sumber daya publik secara efisien dan bersih dari praktik korupsi, APIP menjadi pilar penting untuk menjamin bahwa kebijakan dan program pembangunan direalisasikan dengan integritas dan hasil yang nyata. Audit pemerintah memainkan peran penting dalam mengurangi korupsi dan memperbaiki tata kelola publik (Liu & Lin, 2012).

Korupsi masih menjadi sumber hambatan utama atas ketercapaian pembangunan ekonomi, merusak kinerja pemerintah serta melemahkan kepercayaan publik, sehingga upaya untuk mengendalikannya menjadi elemen yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan Pembangunan (Hope, 2020; Huong et al., 2025; Kolberg-Shah & Shin, 2024; Nguyen & Nguyen, 2025; Nimer et al., 2025; Zhang et al., 2023). Negara dengan tingkat korupsi lebih rendah cenderung lebih berhasil dalam mencapai target SDGs (Gallego-Álvarez et al., 2025). Mugellini & Villeneuve (2019) menyebutkan pentingnya untuk memperbaiki sistem pemantauan SDGs dengan memperhitungkan risiko korupsi secara hati-hati agar data dan indikator yang digunakan benar benar mencerminkan kondisi nyata, bukan sekadar laporan

administratif. Selanjutnya, Tantangan utama dalam memantau kemajuan SDGs adalah ketersediaan indikator dan data yang belum cukup kuat, terutama untuk isu korupsi dan tata kelola (Mugellini et al., 2021). Korupsi yang tinggi atau pengawasan yang lemah dapat mendorong pelaksana proyek lebih fokus pada keuntungan daripada kepentingan publik, yang pada akhirnya membuat layanan air dan sanitasi tidak memenuhi kebutuhan masyarakat (Pusok, 2016).

Pencapaian Sustainable Development Goals semakin dipandang tidak hanya sebagai agenda pembangunan, tetapi juga sebagai cerminan kualitas tata kelola sektor publik. Secara teoretis, pendekatan tata kelola yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan integritas kelembagaan diyakini mampu meningkatkan efektivitas kebijakan publik karena proses pengambilan keputusan berada dalam pengawasan publik dan penggunaan sumber daya lebih terarah pada kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka ini, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan mekanisme pengendalian korupsi menjadi elemen penting karena keduanya berfungsi menjaga kepatuhan, keandalan pelaporan, serta perlindungan aset publik. Literatur sebelumnya banyak menyoroti pentingnya transparansi dan tata kelola bagi keberhasilan SDGs, namun kajian yang secara khusus mengaitkan fungsi pengawasan internal pemerintah dengan pencapaian tujuan pembangunan, terutama yang berdampak langsung pada kualitas hidup seperti akses air bersih dan sanitasi, masih terbatas.

Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan memposisikan pengawasan internal dan pengendalian korupsi sebagai faktor tata kelola yang berpotensi memengaruhi pencapaian SDG 6, sehingga memperluas diskursus akuntansi sektor publik dari fokus administratif menuju kontribusi nyata terhadap agenda pembangunan berkelanjutan. Kebaruan studi terletak pada integrasi perspektif pengendalian internal sektor publik dengan kerangka SDGs pada level pemerintah daerah, yang jarang dibahas secara eksplisit dalam literatur sebelumnya. Secara praktis, kajian ini memberikan dasar konseptual bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat kapasitas pengawas internal dan sistem pencegahan korupsi sebagai strategi tata kelola yang mendukung peningkatan layanan dasar masyarakat, khususnya penyediaan air minum dan sanitasi yang layak, sekaligus mendorong pengelolaan anggaran yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan.

2. TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Agency Theory (Teori Keagenan)

Teori keagenan yang dipopulerkan oleh Meckling & Jensen (1976) menjadi landasan utama penelitian. Dalam konteks sektor publik, rakyat bertindak sebagai *principal* yang mendelegasikan wewenang pengelolaan sumber daya kepada pemerintah sebagai *agent*. Masalah keagenan muncul ketika ada asimetri informasi dan potensi *moral hazard* (korupsi). Dalam penelitian ini, Teori Keagenan Meckling & Jensen (1976) digunakan sebagai pisau analisis utama untuk menjelaskan hubungan fungsional antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks sektor publik, masyarakat bertindak sebagai *principal* yang mempercayakan sumber daya (pajak dan aset negara) kepada pemerintah (eksekutif dan birokrasi) yang bertindak sebagai *agent* untuk dikelola demi kesejahteraan umum, yang dalam penelitian ini direpresentasikan oleh capaian SDGs. Masalah keagenan muncul ketika terjadi asimetri informasi, di mana *agent* memiliki informasi lebih banyak dibandingkan *principal*, yang

memicu potensi perilaku oportunistik atau *moral hazard* berupa tindak pidana korupsi atau inefisiensi anggaran.

APIP adalah aparat pengawasan internal pemerintah yang berfungsi mengawasi pengelolaan keuangan dan kinerja instansi. Perannya terkait dengan monitoring melalui pengawasan, evaluasi, dan audit, serta dengan bonding melalui peningkatan kepatuhan, akuntabilitas, dan pengendalian risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, keberadaan APIP dan efektivitas pengendalian korupsi dipandang sebagai mekanisme *monitoring* dan *bonding* yang krusial untuk memitigasi biaya keagenan (*agency cost*) tersebut. APIP berfungsi untuk mengurangi asimetri informasi melalui audit dan pengawasan, memastikan bahwa *agent* bekerja sesuai dengan kontrak sosial (target SDGs). Secara teoritis, jika peran APIP kuat dan pengendalian korupsi efektif, maka penyimpangan anggaran dapat diminimalkan, sehingga sumber daya publik dapat dialokasikan secara maksimal untuk pencapaian indikator-indikator SDGs.

Institutional Theory (Teori Institusional)

Sementara Teori Keagenan berfokus pada mekanisme pengawasan internal, Teori Institusional DiMaggio & Powell (1983) digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan dorongan eksternal dan kebutuhan akan legitimasi organisasi. Teori ini berpendapat bahwa organisasi pemerintah tidak hanya beroperasi berdasarkan efisiensi teknis, tetapi juga harus menyesuaikan diri dengan tekanan lingkungan (isomorfisma) untuk mendapatkan legitimasi politik dan sosial. Capaian SDGs di Indonesia bukan sekadar target teknokratis, melainkan sebuah norma global dan mandat nasional (Perpres No. 59 Tahun 2017 dan perubahannya) yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah maupun pusat (isomorfisma koersif).

Dalam perspektif ini, penguatan peran APIP dan penerapan pengendalian korupsi merupakan respons institusional pemerintah untuk menunjukkan kepatuhan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Public Governance*). Dengan menerapkan pengendalian korupsi yang ketat dan memberdayakan APIP, pemerintah sedang membangun legitimasi di mata publik dan komunitas internasional bahwa mereka adalah entitas yang akuntabel. Teori ini memprediksi bahwa semakin kuat tekanan institusional untuk mencapai SDGs (tekanan regulasi dan sosial), semakin pemerintah akan memperkuat struktur pengendalian internalnya (APIP dan antikorupsi) untuk memastikan legitimasi tersebut terjaga, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan capaian SDGs.

Pengembangan Hipotesis

Sustainable Development Goals

Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (“Perpres No. 86 Tahun 2020”), prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu aspek yang diperhatikan (Syahwiah et al., 2023). Selanjutnya, dalam Peraturan Presiden No.108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (“Perpres No. 108 Tahun 2022”), air merupakan salah satu prioritas nasional memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Terkait dengan hal tersebut, terdapat program SDGs, yang meliputi 17 poin unggulan, salah satunya adalah adanya akses air bersih dan sanitasi. Dijabarkan dalam beberapa hal, diantaranya (Syahwiah et al., 2023): 1) Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman dilaksanakan dengan kebijakan peningkatan tata

kelola kelembagaan dan kapasitas penyelenggara untuk penyediaan air minum layak maupun aman. 2) Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi. 3) Percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, peningkatan keterpaduan dalam penyediaan air minum dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku.

SDGs merupakan agenda pembangunan global sebagai transformasi *Millenium Development Goals* (MDGs) untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. SDGs meneruskan prioritas-prioritas pembangunan MDGs yang meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan (Syahputra, 2021).

Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)

Lemahnya pengawasan di tingkat daerah disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah rendahnya kapabilitas APIP. Sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), APIP memiliki tugas penting dalam memastikan agar seluruh kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, dan efektif (Kusuma & Firmansyah, 2024). Namun, peran ini sering kali tidak terlaksana dengan baik karena kurangnya kompetensi dan dukungan teknologi yang memadai. Menurut Dewi et al. (2023), kurangnya dukungan teknologi dalam sistem pengawasan internal menyebabkan penurunan efektivitas pengawasan dan membuat tindakan pencegahan korupsi menjadi lemah. Selain itu, perkembangan teknologi yang pesat belum diadopsi secara optimal dalam sistem pengawasan internal. APIP yang kapabel (level IACM tinggi) mampu memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola dan mencegah inefisiensi anggaran. Semakin efektif peran *consulting* dan *assurance* APIP, semakin akurat perencanaan dan eksekusi program pembangunan daerah. Dalam konteks SDG 6, peran ini menjadi krusial karena APIP dapat memastikan bahwa anggaran dan program sanitasi dialokasikan dan dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat. Pengawasan yang efektif mendorong ketepatan sasaran pembangunan sanitasi, mengurangi risiko penyimpangan anggaran, dan meningkatkan kualitas layanan sanitasi layak. Hal ini sejalan dengan temuan Sarens et al. (2012) yang menyatakan bahwa audit internal memberikan nilai tambah pada efektivitas operasional sektor publik.

H1: Semakin tinggi kapabilitas dan peran APIP, semakin tinggi tingkat capaian indikator SDG 6.

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

Indonesia adalah negara yang masih memiliki kesulitan dalam penanganan kasus korupsi di dunia, hal ini diketahui setelah diadakannya. pemeringkatan mengenai negara yang masih memiliki masalah dalam sektor publik. Data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mengenai Indeks Persepsi Korupsi (IPK), pada tahun 2022 menunjukkan adanya penurunan nilai yang semula dari 38 menjadi 34 atau sama saja berada dalam peringkat 110 dari 180 negara. Nilai IPK dari 0 sampai dengan 100, dimana 0 direpresentasikan sebagai negara paling korup, sedangkan 100 direpresentasikan sebagai negara paling bersih dalam korupsi Hananti et al. (2021). Hal ini menjadikan peringkat indonesia masuk menjadi $\frac{1}{3}$ negara paling korupsi di dunia. Belum optimal penanganan korupsi di Indonesia ditunjukkan dengan rendahnya nilai IPK dan meningkatnya kerugian negara akibat kasus korupsi.

Korupsi dianggap sebagai hambatan terbesar pembangunan (*sand the wheels hypothesis*). Korupsi mendistorsi alokasi belanja publik, mengalihkan dana dari sektor krusial seperti kesehatan dan pendidikan menuju proyek yang sarat suap. Pengendalian korupsi meminimalkan *leakage* (kebocoran) sumber daya. Dalam konteks SDG 6, korupsi secara langsung menghambat pemenuhan sanitasi layak karena anggaran sanitasi berisiko tidak tepat sasaran, kualitas infrastruktur menurun, dan cakupan layanan tidak menjangkau kelompok rentan. Pengendalian korupsi dapat meminimalkan kebocoran sumber daya sehingga dana publik dapat dialokasikan secara efektif untuk pembangunan sarana sanitasi, pengelolaan air limbah, dan akses sanitasi aman. Studi Musah (2024) mengonfirmasi bahwa pengendalian korupsi memoderasi hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pembangunan berkelanjutan.

H2: Semakin efektif pengendalian korupsi, semakin tinggi tingkat capaian indikator SDG 6.

3. RESEARCH METHODS

Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan data 548 pemerintah daerah di Indonesia yang mencakup provinsi, kabupaten, dan kota pada tahun 2021. Pemilihan tahun 2021 didasarkan pada pertimbangan bahwa tahun tersebut merupakan periode awal pemulihan pasca pandemi COVID-19, di mana tekanan terhadap tata kelola pemerintahan dan efektivitas pengawasan internal meningkat secara signifikan. Teknik purposive sampling diterapkan dengan mengecualikan kabupaten dan kota administratif serta daerah yang tidak memiliki data. Karena satu daerah tidak memiliki data SDG 6 dan enam kabupaten dan kota administratif dikeluarkan, jumlah sampel akhir menjadi 541 observasi. Semua data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari instansi Pemerintah Indonesia.

Operasionalisasi Variabel

Variabel utama pada penelitian ini adalah $SDG6_i$, $APIP_i$, dan $IEPK_i$. Pada penelitian ini variabel $SDG6_i$ menggunakan indikator 6.2.1 (b) persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak. Pencapaian SDG 6 diukur menggunakan indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah rumah tangga yang menggunakan fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan dengan total rumah tangga, kemudian dikalikan 100 persen. Data diperoleh dari laporan resmi Bappenas yang disusun berdasarkan statistik nasional dan kerangka indikator SDGs Indonesia. $APIP_i$ merupakan variabel kapabilitas APIP yang diukur menggunakan level 1-5. Level 1 menyatakan bahwa tidak ada praktik yang tetap dan masih bergantung pada kinerja individu, kemudian level 2 menyatakan bahwa proses audit dilakukan secara tetap dan telah didukung dengan kualifikasi kompetensi SDM yang memadai, lalu level 3 menyatakan bahwa APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan standar dan kualitas hasil pengawasan APIP telah memberikan keyakinan atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas serta dapat memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan memelihara serta meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. Pada

level ini, APIP sudah dinyatakan efektif karena APIP telah melakukan jasa konsultasi dan audit kinerja terhadap program prioritas.

Selanjutnya pada level 4 menyatakan bahwa APIP telah menjadi mitra strategis organisasi dan dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui hasil pengawasannya terkait dengan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian. Yang terakhir, yaitu level 5 menyatakan bahwa APIP telah berpraktik secara optimal dimana APIP telah memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan organisasi mengenai efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. IEPK_i merupakan variabel yang menggambarkan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi, diukur menggunakan skala 1–10. Nilai yang rendah menandakan bahwa pemerintah belum memiliki kebijakan yang mendukung penerapan praktik pengendalian internal. Sebaliknya, skor IEPK_i yang tinggi mencerminkan bahwa pengendalian internal pada pemerintah daerah telah berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Variabel kontrol pada penelitian ini adalah SIZE_i, IPM_i, AGES_i, MUN_i, dan ISLAND_i. SIZE_i merupakan variabel ukuran pemerintah daerah pada tahun yang diukur menggunakan logaritma natural (Ln) nilai total aset. IPM_i merupakan variabel indeks pembangunan manusia yang diukur dari tiga indikator utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang digabung menjadi satu indeks $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$. AGES_i merupakan variabel umur pemerintah daerah pada tahun 2021 yang diukur menggunakan jumlah tahun pembentukan pemerintah daerah sampai dengan tahun 2021. MUN_i merupakan variabel status pemerintah daerah yang diukur menggunakan kategorikal, yaitu “2” jika pemerintah daerah berstatus Provinsi, “1” jika pemerintah daerah berstatus Kota, dan “0” jika pemerintah berstatus Kabupaten. Kemudian ISLAND_i merupakan variabel letak geografis pemerintah daerah yang diukur menggunakan dummy, yaitu “1” jika pemerintah daerah berada di pulau Jawa, dan “0” lainnya.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel dan Sumber Data

Nama	Operasionalisasi Variabel	Sumber Data
SDG6 _i	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak.	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).
APIP _i	Kapabilitas APIP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
IEPK _i	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
SIZE _i	Ukuran Pemerintah Daerah tahun 2021, diukur dengan logaritma natural (Ln) total aset Pemerintah Daerah	Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
IPM _i	Indeks Pembangunan Manusia	Badan Pusat Statistik (BPS)

AGES _i	Umur Pemerintah Daerah tahun 2021, diukur dengan jumlah tahun sejak pembentukan pemerintah daerah sampai dengan tahun 2021.	Kementerian Negeri.	Dalam
MUN _i	Status Pemerintah Daerah, diukur dengan kategorikal ordinal status Pemerintah Daerah, yaitu “2” Pemerintah Provinsi, “1” Pemerintah Kota, “0” Pemerintah Kabupaten.	Kementerian Negeri.	Dalam
ISLAND _i	Letak geografis Pemerintah Daerah, diukur dengan dummy pulau, yaitu “1” pulau Jawa, “0” lainnya.	Kementerian Negeri.	Dalam

Research Model

Untuk menjawab permasalahan penelitian sekaligus menguji hipotesis, maka model empiris pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$SDG6_{it} = \alpha + \beta_1 APIP_{it} + \beta_2 IEPK_i + \beta_3 SIZE_i + \beta_4 IPM_i + \beta_5 AGES_i + \beta_6 MUN_i + \beta_7 ISLAND_i + \varepsilon_i$$

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda, uji korelasi, dan uji hipotesis dengan bantuan software statistik STATA 14.0. Penelitian ini juga mengikutsertakan uji multikolinearitas sebagai uji asumsi klasik penelitian.

4. RESULTS AND DISCUSSION

Statistik Deskriptif

Pada Tabel 2 menggambarkan statistik deskriptif untuk keseluruhan variabel yang dianalisis pada penelitian ini. Data ini menunjukkan bahwa kondisi antar daerah memang jauh dari kata seragam. Rata-rata pencapaian SDG 6 berada pada angka 77,41, dengan rentang yang sangat lebar, mulai dari 0,26 hingga mendekati 100. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antar daerah, di mana sebagian wilayah sudah hampir mencapai target, sementara wilayah lain masih tertinggal jauh. Nilai rata-rata tersebut berarti sekitar 77,41 persen rumah tangga telah memiliki akses terhadap sanitasi layak. Meski mencerminkan capaian yang relatif baik secara nasional, masih terdapat sekitar 22,59 persen rumah tangga yang belum menikmati fasilitas sanitasi sesuai standar kesehatan. Kesenjangan ini menegaskan perlunya penguatan kebijakan, alokasi pendanaan yang lebih tepat sasaran, dan pengawasan yang efektif agar pemenuhan sanitasi layak dapat menjangkau seluruh masyarakat sesuai target SDG 6. Kapasitas APIP dan efektivitas pengendalian korupsi berada pada level menengah, namun tetap terlihat perbedaan kinerja antar daerah. Secara rata-rata, kapasitas APIP dan efektivitas pengendalian korupsi berada pada kategori menengah, yang menunjukkan bahwa fungsi pengawasan telah berjalan namun belum optimal. Pada saat yang sama, sebaran data memperlihatkan adanya perbedaan kinerja yang signifikan antar daerah, di mana sebagian daerah telah memiliki sistem pengendalian yang relatif baik, sementara daerah lainnya masih menunjukkan kelemahan dalam kapasitas pengawasan dan pengendalian korupsi. Perbedaan ini memberi gambaran kuat tentang ketimpangan kapasitas fiskal. Nilai rata-rata IPM sebesar 69,93 menunjukkan bahwa tingkat pembangunan manusia secara umum berada pada kategori menengah. Namun, rentang nilai yang lebar mengindikasikan masih adanya daerah dengan tingkat pembangunan manusia yang rendah, sehingga kualitas kesehatan, pendidikan, dan

standar hidup belum merata antar daerah. Kondisi ini mencerminkan ketimpangan pembangunan manusia yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan daerah.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Keterangan	Mean	Standar Deviasi	Min	Max
SDG _{6i}	77.41	17.91	0.26	99.97
APIP _i	2.36	0.59	1	3
IEPK _i	1.60	0.65	0	3
SIZE _i *)	5.543	23.99	0.793	544.505
IPM _i	69.93	6.24	32.84	87.18
AGES _i	44.23	23.97	7	71
MUN _i	0.29	0.57	0	2
ISLAND _i	0.21	0.41	0	1

Jumlah Observasi = 541.

Penjelasan operasionalisasi variabel pada tabel 1

*) Dalam triliun rupiah.

Berbeda dengan itu, variabel usia institusi pemerintah daerah memiliki rata-rata sebesar 44.23 yang mengindikasikan bahwa rata-rata usia sampel telah terbentuk sekitar 44 tahun, sebelum pelaksanaan reformasi pemerintah Indonesia. Sedangkan variabel munisipal dan status kepulauan memiliki rata-rata masing-masing sebesar 0.29 dan 0.21, dapat diinterpretasikan bahwa rata-rata sampel yang digunakan adalah pemerintah daerah yang terletak di luar Pulau Jawa dan memiliki status kabupaten. Selanjutnya, hasil analisis korelasi antara masing-masing variabel disajikan pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3
Analisis Korelasi Variabel

Variabel	SDG _{6i}	APIP _i	IEPK _i	SIZE _i	IPM _i	AGES _i	MUN _i	ISLAND _i
SDG _{6i}	1.000							
APIP _i	0.236*** (0.000)	1.000						
IEPK _i	0.212*** (0.000)	0.252*** (0.000)	1.000					
SIZE _i	0.200*** (0.000)	0.212*** (0.000)	0.146*** (0.000)	1.000				
IPM _i	0.688*** (0.000)	0.304*** (0.000)	0.179*** (0.000)	0.367*** (0.000)	1.000			
AGES _i	0.215*** (0.000)	0.192*** (0.000)	0.203*** (0.000)	0.385*** (0.000)	0.337*** (0.000)	1.000		
MUN _i	0.215*** (0.004)	0.210*** (0.000)	0.094** (0.030)	0.498*** (0.000)	0.425*** (0.000)	0.086** (0.044)	1.000	
ISLAND _i	0.109*** (0.000)	0.056*** (0.000)	0.022* (0.600)	0.377*** (0.000)	0.240*** (0.000)	0.456*** (0.000)	0.043* (0.317)	1.000

Jumlah Observasi = 541.

Penjelasan operasionalisasi variabel pada tabel 1.1.

***, **, * = *P-value* signifikan 1%, 5%, 10%.

Pada tabel 3 menunjukkan menunjukkan bahwa seluruh variabel utama penelitian ini, seperti $SDG6_i$, $APIP_i$, dan $IEPK_i$ menunjukkan korelasi yang cukup konsisten antara satu dengan lainnya serta memberi gambaran awal mengenai pola data. $SDG6$ berkorelasi secara positif dengan semua variabel penelitian dengan IPM menjadi korelasi terkuat sebesar 0.688 yang artinya daerah dengan kualitas pembangunan manusia lebih tinggi memiliki kecenderungan lebih baik dalam pencapaian $SDG6$. Sedangkan korelasi antara $SDG6$ dengan $APIP$, $IEPK$, dan ukuran pemerintah berkisar 0.200 hingga 0.236 yang menunjukkan hubungan positif namun tidak begitu kuat. Hal tersebut masih masuk akal karena pencapaian terhadap $SDG6$ dipengaruhi oleh banyak faktor. $APIP$ berkorelasi positif dengan $IEPK$ dan ukuran pemerintah berkisar antara 0.212 sampai 0.252. Daerah dengan kapabilitas $APIP$ yang lebih kuat cenderung memiliki pengendalian korupsi dan anggaran yang lebih baik. Hal yang serupa juga terlihat pada variabel IPM , yang menunjukkan korelasi sebesar 0.304 dengan $APIP$ yang menandakan bahwa kapabilitas $APIP$ meningkat seiring dengan pembangunan manusia.

Selain itu, variabel $SIZE$ berkorelasi secara positif dengan seluruh variabel dan cukup besar dengan MUN dan $AGES$. Hal ini menggambarkan bahwa daerah yang termasuk perkotaan dan memiliki usia pemerintahan lebih lama umumnya memiliki total aset yang lebih besar. Variabel $AGES$ menunjukkan korelasi yang positif terhadap seluruh variabel yang lain, terutama terhadap ukuran $SIZE$ dan IPM . Pola tersebut menggambarkan bahwa semakin matang sebuah pemerintah daerah maka semakin besar pula sumber daya dan tingkat pembangunan manusianya lebih tinggi. Variabel MUN dan $ISLAND$ terlihat bergerak searah dengan variabel lainnya, terutama $SIZE$ dan IPM . Ini menunjukkan adanya perbedaan karakteristik wilayah, karena daerah perkotaan dan kepulauan biasanya memiliki kondisi ekonomi dan sosial yang tidak sama. Jika dilihat secara keseluruhan, kekuatan korelasinya berada pada tingkat rendah hingga sedang. Tidak ada nilai yang mendekati 1, sehingga risiko multikolinieritas kuat tampak kecil. Pola ini memberi sinyal bahwa hubungan antar variabel cukup stabil dan sesuai dengan kondisi nyata pemerintahan daerah.

Hasil

Hasil pengujian dengan 541 observasi yang dilaporkan pada Tabel 4 mengkonfirmasi bahwa model regresi layak digunakan ($Prob > F$ 0,000) dan bebas dari masalah multikolinearitas (Mean VIF 1,42), dengan kemampuan menjelaskan 48,8% variasi capaian SDG (Adj R-squared 0,488). Pengujian hipotesis utama menunjukkan temuan kontras: Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi x($IEPK$) terbukti berpengaruh positif dan signifikan (koefisien 2,513; p-value 0,005), sedangkan Kapabilitas $APIP$ tidak memiliki dampak signifikan secara statistik (p-value 0,546), mengindikasikan bahwa keberhasilan capaian lebih didorong oleh integritas pengendalian korupsi dibandingkan struktur pengawasan internal semata.

Terkait variabel kontrol, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berkontribusi positif signifikan (koefisien 2,097), sementara variabel MUN menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan (koefisien -3,095) terhadap variabel dependen. Sebaliknya, karakteristik struktural daerah lainnya seperti ukuran pemerintah ($SIZE$), umur pemerintah daerah ($AGES$), dan lokasi ($ISLAND$) tidak terbukti berpengaruh signifikan, menegaskan bahwa kualitas modal manusia

dan tata kelola yang bersih menjadi determinan yang lebih krusial dibandingkan atribut administratif kewilayahan.

Table 4. Hasil Uji Hipotesis

Variable	Expected Sign	SDG6 _i
_CONS		-66.305 (0.016)
APIP _i	(+)	0.609* (0.546)
IEPK _i	(+)	2.513*** (0.005)
SIZE _i	(+/-)	-0.224* (0.815)
IPM _i	(+/-)	2.097*** (0.000)
AGES _i	(+/-)	-0.012* (0.655)
MUN _i	(+/-)	-3.095*** (0.010)
ISLAND _i	(+/-)	-2.334* (0.139)
Prob > F		0.000
R-squared		0.494
Adj R-squared		0.488
Mean VIF		1.42
Number of Observations = 541 Observations.		
***, **, * = <i>P-value</i> signifikan 1%, 5%, 10%.		

Pembahasan Penelitian

Dari pengujian hipotesis yang ditampilkan pada tabel 4 menunjukkan bahwa Kapabilitas APIP tidak berpengaruh terhadap keberhasilan SDG 6 yang berarti hipotesis ditolak. APIP (Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) terbukti secara statistik tidak berpengaruh terhadap keberhasilan capaian SDG dengan hasil *p-value* 0.546. Banyak riset menemukan bahwa daerah dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) belum tentu memiliki kinerja pembangunan yang baik. Karena APIP sibuk menjaga WTP, fokus pada efektivitas program pembangunan (SDG) menjadi terabaikan. Penelitian yang dilakukan Getie Mihret & Wondim Yismaw (2007) menyatakan bahwa efektivitas audit internal sangat dipengaruhi oleh dukungan manajemen dan *atribut auditee*. Jika manajemen (pihak pemda) hanya peduli pada administrasi keuangan, audit internal tidak akan berdampak pada perbaikan kinerja operasional. Selain itu, fenomena ini dapat dijelaskan melalui perspektif teori institusional (DiMaggio & Powell, 1983), di mana peningkatan level kapabilitas APIP di daerah kemungkinan masih bersifat simbolis (*isomorphism*) untuk memenuhi regulasi pusat, namun belum terinternalisasi dalam

praktik pengawasan kinerja program pembangunan (*performance audit*). Akibatnya, tingginya level APIP belum menjamin efektivitas program-program strategis daerah dalam mencapai target SDG.

Temuan Makarenko & Plastun (2017) juga memberi dasar yang kuat untuk menjelaskan mengapa tujuan 6 tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Mereka menegaskan bahwa kontribusi akuntan profesional paling dominan berada pada tujuan 12.6, 08.03, 17.16, dan 17.18 yang berkaitan langsung dengan praktik bisnis berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi, kemitraan, serta penguatan kapasitas data dan pelaporan. Fokus peran ini berada pada ranah tata kelola, akuntabilitas, dan kinerja organisasi. Sebaliknya, tujuan 6 lebih bergantung pada aspek teknis penyediaan air bersih dan sanitasi yang ditentukan oleh kapasitas infrastruktur dan kebijakan operasional di lapangan. Pola ini sejalan dengan temuan Mendes de Oliveira et al. (2022) yang menunjukkan tidak adanya hubungan signifikan antara lingkungan pengendalian internal dan tujuan pembangunan berkelanjutan yang secara spesifik ditujukan untuk menekan kecurangan. Kedua temuan ini memperkuat argumen bahwa instrumen tata kelola dan akuntansi tidak selalu berdampak langsung pada tujuan SDGs yang sangat bersifat teknis dan berbasis layanan dasar.

Sementara itu, variabel Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK_i) terbukti positif dan signifikan berpengaruh terhadap SDG6i. Semakin tinggi indeks efektivitas pengendalian korupsi, maka akan semakin tinggi pula skor capaian SDG di daerah tersebut. Berdasarkan hasil statistik dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif yang kuat. Jika skor pengendalian korupsi naik 1 poin, maka skor capaian SDG daerah tersebut akan naik sebesar 2.513 poin. Dari hasil pengujian hipotesis ini, dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Setiawan et al. (2025) yang menyatakan bahwa semakin efektif pengendalian korupsi pada suatu daerah, maka akan semakin tinggi pula tingkat keberhasilan SDG di daerah tersebut. Penelitian lainnya yang menguji hubungan antara *good government governance* dengan SDG 16, pembangunan berkelanjutan membutuhkan alokasi sumber daya yang tepat sasaran. Tanpa *good governance* (pengendalian korupsi yang efektif), sumber daya ekonomi dan manusia bisa salah sasaran, sehingga menghambat pencapaian target-target SDG seperti pengentasan kemiskinan atau layanan dasar (Yanto et al., 2024).

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa beberapa variabel kontrol ternyata ikut memainkan peran penting dalam menjelaskan variasi capaian sanitasi layak di berbagai daerah. IPM, status pemerintah daerah, dan letak geografis muncul sebagai faktor yang benar-benar memberi pengaruh dalam model. Temuan ini masuk akal, karena kualitas hidup masyarakat yang tercermin dalam IPM biasanya berdampingan dengan kemampuan daerah menyediakan layanan dasar, termasuk sanitasi (Suhardono et al., 2024). Begitu pula dengan status pemerintah daerah yaitu provinsi dan kota, yang umumnya memiliki kapasitas fiskal serta kelembagaan lebih kuat, tampak lebih mampu mendorong ketersediaan infrastruktur sanitasi (Waskitawati et al., 2019). Sementara itu, letak geografis menunjukkan bahwa kondisi fisik dan karakter wilayah masih menjadi tantangan sekaligus penentu dalam upaya memperluas akses sanitasi (Marchesi et al., 2023).

Di sisi lain, ukuran pemerintah daerah dan umur pemerintah daerah tidak menunjukkan pengaruh yang berarti. Artinya, besarnya aset suatu daerah atau lamanya daerah tersebut berdiri

tidak secara otomatis membuat layanan sanitasi lebih baik. Hal ini memberi gambaran bahwa ketersediaan sumber daya atau pengalaman institusional saja tidak cukup, tetapi kebijakan yang tepat, komitmen pemerintah, dan respons terhadap kebutuhan masyarakat justru lebih menentukan (Winarna et al., 2021). Secara keseluruhan, keberadaan variabel kontrol ini membantu memberi konteks yang lebih utuh. Hasilnya menunjukkan bahwa pencapaian sanitasi layak bukan hanya persoalan variabel utama yang diteliti, tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik sosial dan kelembagaan tertentu, sementara aspek-aspek struktural seperti ukuran dan usia daerah ternyata tidak selalu relevan. Temuan ini memberi pesan bahwa pembangunan sanitasi membutuhkan pendekatan yang lebih substantif daripada sekadar mengandalkan kapasitas yang terlihat di permukaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini berfokus pada bagaimana kualitas tata kelola pemerintah daerah, khususnya melalui kapasitas APIP dan efektivitas pengendalian korupsi, berperan dalam mendukung pencapaian SDG 6. Masih terbatasnya akses sanitasi layak menunjukkan bahwa capaian pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh bagaimana anggaran tersebut dikelola, diawasi, dan dilindungi dari praktik korupsi. Penelitian ini menempatkan pengawasan internal sebagai faktor kunci yang menjembatani tata kelola publik dan kualitas hidup masyarakat, dengan menelaah sejauh mana APIP dan pengendalian korupsi dapat mendorong pemenuhan layanan dasar air bersih dan sanitasi yang layak di tingkat daerah. Penelitian ini menggunakan sampel pemerintah daerah di Indonesia yang dipilih melalui metode *purposive sampling*, dengan kriteria ketersediaan data APIP, pengendalian korupsi, dan indikator sanitasi layak dalam periode pengamatan. Dari proses tersebut, diperoleh sebanyak 541 observasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian korupsi berperan signifikan dalam meningkatkan capaian SDGs khususnya SDG 6, sementara kapabilitas APIP tidak memberikan pengaruh yang berarti. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kualitas tata kelola yang substantif lebih menentukan keberhasilan pembangunan dibanding peningkatan kapasitas pengawasan yang bersifat administratif. Analisis variabel kontrol juga memperlihatkan bahwa IPM, status pemerintah daerah, dan letak geografis turut mempengaruhi pencapaian sanitasi layak. Sebaliknya, ukuran dan umur pemerintah daerah tidak terbukti berpengaruh, sehingga keberhasilan layanan dasar tidak dapat disimpulkan hanya dari besarnya aset atau lamanya institusi berdiri. Secara keseluruhan, studi ini menegaskan bahwa keberhasilan pencapaian SDGs merupakan hasil dari perpaduan antara tata kelola yang efektif, kualitas pembangunan manusia, serta kondisi wilayah, bukan semata-mata karakteristik struktural pemerintah daerah.

Mengingat temuan bahwa kapabilitas APIP secara struktural belum berdampak signifikan, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan proksi pengawasan yang lebih substantif, seperti rasio tindak lanjut temuan pemeriksaan atau kualitas rekomendasi audit, guna menangkap efektivitas riil fungsi *assurance* di lapangan. Selain itu, perluasan periode pengamatan menjadi data panel dan penggunaan pendekatan kualitatif (*mixed-method*) sangat direkomendasikan untuk menggali lebih dalam penyebab inefektivitas pengawasan internal tersebut, serta menguji konsistensi model ini pada indikator SDG sektor strategis lainnya seperti kesehatan atau pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2023). *SDGs*. <https://Sdgs.Bappenas.Go.Id/>.
- Bappenas. (2025). *SDGs Indonesia: Goal 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak*. <https://sdgs.bappenas.go.id/17-goals/goal-6/>.
- Bilsky, E., Moreno, A. C., & Fernández Tortosa, A. (2021). Local governments and SDG localisation: Reshaping multilevel governance from the bottom up. *Journal of Human Development and Capabilities*, 22(4), 713–724.
- Dewi, S., As Salma, H., La Tansa Mashiro Rangkas Bitung, U., & Swadaya Jakarta Corresponding Author, S. (2023). The Role of Internal Audit, Code of Ethics, and Independence on Audit Quality (Case Study at the Inspectorate Office of Banten Province in 2022). *Indonesian Journal of Economic & Management Sciences (IJEMS)*, 1(1), 39–58. <https://journal.formosapublisher.org/index.php/ijems/article/view/3231>
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160.
- Fatristya, L. G. I., Wardatun Saimah, Islamul Hadi, & Evi Aryanti. (2025). Peran Air Bersih dan Sanitasi dalam Meningkatkan Kualitas Hidup: Tinjauan Literatur terhadap Pencapaian Tujuan SDGs 2030. *Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, Dan Geofisika (GeoScienceEd Journal)*, 6(1), 596–602. <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v6i1.598>.
- Gallego-Álvarez, I., Nieto-Librero, A. B., & Martín-Gallego, E. (2025). Sustainable Development Goals and Corruption: An International Situation Analysis Through the Application of a Three-Way Multivariate Analysis. *Sustainability*, 17(5), 1806.
- Getie Mihret, D., & Wondim Yismaw, A. (2007). Internal audit effectiveness: an Ethiopian public sector case study. *Managerial Auditing Journal*, 22(5), 470–484.
- Gomez, L. E., Moran, M. L., Navas, P., Verdugo, M. A., Schalock, R. L., Lombardi, M., Vicente, E., Guillén, V. M., Balboni, G., & Swerts, C. (2024). Using quality of life framework to operationalize and assess the CRPD articles and the Sustainable Development Goals. *Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities*, 21(1), e12470.
- Guha, J., & Chakrabarti, B. (2019). Achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) through decentralisation and the role of local governments: a systematic review. *Commonwealth Journal of Local Governance*, 1–21.
- Hananti, N. P., Pratama, R. A., & Sidabutar, T. R. A. (2021). Analisis efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia. *Indigenous Knowledge*, 2(5), 359–366.
- HaoYue, L., & Loang, O. K. (2023). Impact Of Internal Audit on Sustainable Development Goals in China. *International Journal of Accounting*, 8(46), 168–185.
- Hope, K. R. (2020). Corruption reduction as a target of the sustainable development goals: Applying indicators and policy frameworks. In *The emerald handbook of crime, justice and sustainable development* (pp. 105–130). Emerald Publishing Limited.
- Huong, G. N. T., Hoa, D. V., & Hong, V. N. (2025). Does corruption impact on state budget:

- evidence of southeast Asia countries with a focus on Vietnam. *Public Finance Quarterly*, 71(2), 121–145. https://doi.org/10.35551/PFQ_2025_2_6
- Kolberg-Shah, D., & Shin, H. (2024). Can corruption connect you to politics? Nepotism, anxiety, and government blame. *Political Psychology*, 45(5), 871–891.
- Kusuma, M. H., & Firmansyah, A. (2024). Strategi peningkatan kapabilitas APIP untuk optimalisasi pencegahan korupsi di Indonesia. *Jurnalku*, 4(4), 433–446.
- Liu, J., & Lin, B. (2012). Government auditing and corruption control: Evidence from China's provincial panel data. *China Journal of Accounting Research*, 5(2), 163–186.
- Makarenko, I., & Plastun, A. (2017). The role of accounting in sustainable development. *Accounting and Financial Control*, 1(2), 4–12.
- Marchesi, M. D. T., do Couto, E. V., & Gomes, U. A. F. (2023). Geographical inequalities in access to water and sanitation among Brazilian maritime islands' inhabitants. *Applied Geography*, 161, 103120.
- Martínez-Ferrero, J., & García-Meca, E. (2020). Internal corporate governance strength as a mechanism for achieving sustainable development goals. *Sustainable Development*, 28(5), 1189–1198.
- Masuda, H., Kawakubo, S., Okitasari, M., & Morita, K. (2022). Exploring the role of local governments as intermediaries to facilitate partnerships for the Sustainable Development Goals. *Sustainable Cities and Society*, 82(March), 103883. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2022.103883>
- Meckling, W. H., & Jensen, M. C. (1976). Theory of the Firm. *Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*, 3(4), 305–360.
- Mendes de Oliveira, D. K., Imoniana, J. O., Slomski, V., Reginato, L., & Slomski, V. G. (2022). How do internal control environments connect to sustainable development to curb fraud in Brazil? *Sustainability*, 14(9), 5593.
- Mugellini, G., & Villeneuve, J.-P. (2019). Monitoring the risk of corruption at international level: The case of the United Nations sustainable development goals. *European Journal of Risk Regulation*, 10(1), 201–207.
- Mugellini, G., Villeneuve, J., & Heide, M. (2021). Monitoring sustainable development goals and the quest for high-quality indicators: Learning from a practical evaluation of data on corruption. *Sustainable Development*, 29(6), 1257–1275.
- Mulligan, M., van Soesbergen, A., Hole, D. G., Brooks, T. M., Burke, S., & Hutton, J. (2020). Mapping nature's contribution to SDG 6 and implications for other SDGs at policy relevant scales. *Remote Sensing of Environment*, 239, 111671.
- Musah, A. (2024). The role of institutional efficiency in achieving the SDGs: evidence from Africa. *Journal of Business and Socio-Economic Development*, 4(4), 359–369.
- Mutiarani, N. D., & Siswantoro, D. (2020). The impact of local government characteristics on the accomplishment of Sustainable Development Goals (SDGs). *Cogent Business and Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1847751>
- Nguyen, N. A., & Nguyen, D. N. (2025). Anti-corruption in Vietnam - an institutional analysis.

Cogent Social Sciences 11(1).

- Nimer, K., Bani-Mustafa, A., AlQudah, A., Alameen, M., & Hassanein, A. (2025). Public perceptions of governance and tax evasion: insights from developed and developing economies. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 23(3), 855–875. <https://doi.org/10.1108/JFRA-06-2022-0234>
- Phan Thi Thanh Quyen, & Marina Ilyinichna Sidorova. (2022). The Relationship Between Internal Audit and Sustainable Development: Quantitative Study. *The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS*.
- Pusok, K. (2016). Public-private partnerships and corruption in the water and sanitation sectors in developing countries. *Political Research Quarterly*, 69(4), 678–691.
- Ríos, A. M., Guillamón, M. D., & Benito, B. (2024). The influence of local government transparency on the implementation of the sustainable development goals in municipalities. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 36(4), 417–444. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-12-2023-0229>
- Sahari, S. B., Jakpar, S. Bin, & Balia, S. S. Bin. (2023). The Role of Internal Audits on The Performance of Local Government Administration: Evidence from Indonesia. *Public Policy and Administration*, 22(4), 578–593.
- Sarens, G., Abdolmohammadi, M. J., & Lenz, R. (2012). Factors associated with the internal audit function's role in corporate governance. *Journal of Applied Accounting Research*, 13(2), 191–204.
- Setiawan, R. B., Sholikah, M., & Azizi, R. (2025). Pengendalian Kejahatan Korupsi dan Sustainable Development Goals di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1).
- Suhardono, S., Septiariva, I. Y., Prayogo, W., & Suryawan, I. W. K. (2024). Sanitation access in the developing country: The impact of human development, income inequality, and economic growth. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 19(2), 549–570. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/region.v19i2.83327>
- Syahputra, H. W. (2021). Proses Integrasi dan Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Riau. *Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul (JSDMU)*, 2(1), 6–13.
- Syahwiah, A., Sapiddin, A., & Khaerulnisa, K. (2023). Kebijakan Ketersediaan Air Bersih Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Indonesia. *Proceeding APHTN-HAN*, 1(1), 269–292.
- United Nations. (2023). *Take Action for the Sustainable Development Goals*.
- Waskitawati, D., Widianingsih, I., & Gunawan, B. (2019). The Effectiveness of Infrastructure Development for Wastewater Service in Decentralized Indonesia: Case of Bandung Municipality. *TATALOKA*, 21(2), 216–224.
- Winarna, J., Muhtar, M., Sutaryo, S., & Amidjaya, P. G. (2021). Government internal control system and local government administration performance: Evidence from Indonesian Local Governments. *Public Finance Quarterly= Pénzügyi Szemle*, 66(S2), 88–107.

- Yanto, P., Jumanah, J., & Sutoto, S. (2024). Analysis of The Implementation of E-Participation in Public Policy in Indonesia: Potential, Challenges and Impact on The Quality of Public Policy. *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 9(2), 182–200.
- Zhang, M., Zhang, H., Zhang, L., Peng, X., Zhu, J., Liu, D., & You, S. (2023). Corruption, anti-corruption, and economic development. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), 1–13.